

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: KW.20.2/3/PP.00.11/5979/2012

TENTANG

PENETAPAN KEMBALI IZIN PENDIRIAN DAN PENYESUAIAN NOMOR STATISTIK MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka penertiban Izin Pendirian dan Penyesuaian Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah, maka perlu dilakukan penataan dan pengorganisasian Kelembagaan Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 - b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk ditetapkan kembali izin pendirian dan penyesuaian Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah
 - c. Bahwa untuk mendapatkan keabsahan dan legalitas hukum terhadap Madrasah Ibtidaiyah bersangkutan, perlu ditetapkan kembali Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar:
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam:
 - 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 tahun 2003;
 - 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - 9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/462-A/97 tentang Pendirian Madrasah Swasta di Seluruh Indonesia.

Memperhatikan

: 1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ. 1/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik

Lembaga Pendidikan Islam;

 Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. Dj.I/OT.01/230/2012 tanggal 01 Februari 2012 tentang Perapian Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Di Lingkungan Ditjen Pendidikan Islam;

3. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: KW.20.2/3/PP.00.11/5924/2012 tentang Penetapan Kembali Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam pada Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN KEMBALI IZIN PENDIRIAN DAN PENYESUAIAN NOMOR STATISTIK MADRASAHIBTIDAIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Pertama : Menetapkan kembali izin pendirian dan penyesuaian Nomor Statistik MadrasahIbtidaiyahsebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Kepada MadrasahIbtidaiyahseperti yang dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah IbtidaiyahTerdaftar sejak tahun berdiri lembaga seperti tercantum pada kolom 3, dan diberikan Nomor Statistik seperti tercantum pada kolom 4 serta diberikan Piagam Pendirian Madrasah

Ibtidaiyahsebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasahIbtidaiyahtersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana

mestinya.

Keempat : Dengan diterbitkannya penetapan kembali izin pendirian dan penyesuaian Nomor Statistik MadrasahIbtidaiyahdi lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Keputusan Izin Operasional dan

Nomor Statistik MadrasahIbtidaiyahyang lama telah terjadi penyesuaian.

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyahbersangkutan untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal : 12 Desember 2012

An. KEPALA

Kepala Bidang Kependidikan Agama Islam

Dan Pemberdayaan Masjid

76man Ebba, SB 70715 199003 1 001

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI di Jakarta.
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta.
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta.
- 4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.
- 5. Bupati Sumba Timur di Waingapu.
- 6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov.NTT di Kupang.
- 7. Kepala Dinas Pendidikan Prov. NTT di Kupang
- 8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Sumba Timur di Waingapu.
- 9. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sumba Timur di Waingapu.
- 10. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: KW.20.2/3/PP.00.11/5979/2012

No	Nama dan Alamat Madrasah	Tahun Berdiri	Nomor Statistik Madrasah
67	Madrasah Ibtidaiyah Waingapu		
	Alamat : Jl.Dr. Soetomo Waingapu Kec. Kota Waingapu Kab. Sumba Timur	1935	111253120001

Ditetapkan di

Pada tanggal

Kupang 12 Desember 2012

An. KEPALA

Kepala Bidang Kependidikan Agama Islam Dan Bemberdayaan Masjil

Vanyan Ebba, SB

15 199003 1 001